

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka sebagai landasan penyusunan kerangka pemikiran dan pengujian hipotesis penelitian. Sistematika penulisan Bab II meliputi pembahasan konsep dan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian serta penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan penguatan. Selanjutnya, dipaparkan kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antarvariabel dalam model penelitian. Pada bagian akhir, dirumuskan hipotesis penelitian yang akan diuji kebenarannya.

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

2.1.1.1 Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan pendapatan yang diperoleh masyarakat yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang signifikan dalam suatu masyarakat (Todaro, 2003). Ketimpangan pendapatan tersebut terjadi antara kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, termasuk masyarakat yang berada pada garis kemiskinan. Ketimpangan pendapatan juga dapat diartikan sebagai distribusi pendapatan total yang tidak seimbang antar rumah tangga dalam suatu negara, di mana tingkat ketimpangan yang tinggi mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata di dalam masyarakat (Lailatussubha & Nazer, 2025).

Ketimpangan pendapatan merupakan isu penting dalam pembangunan ekonomi karena mencerminkan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang

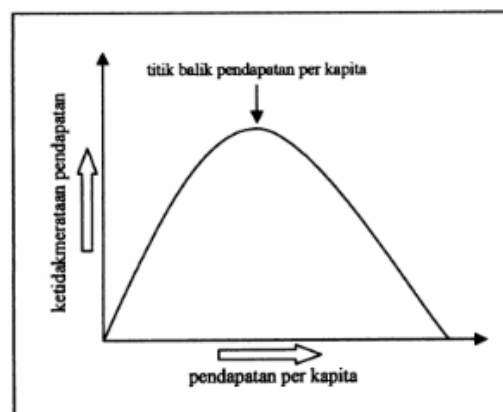
diterima masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan, semakin tidak merata pula distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya kemiskinan, pengangguran, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan sering dijadikan indikator untuk menilai kualitas pembangunan ekonomi suatu daerah dan efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan (Khoirudin & Musta'in, 2020).

Negara-negara berkembang umumnya menghadapi permasalahan berupa ketimpangan pendapatan atau kesenjangan ekonomi. Permasalahan tersebut juga terjadi di Indonesia. Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi tidak meratanya distribusi pendapatan dalam suatu wilayah sebagaimana yang seharusnya. Hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan antar kelompok masyarakat, baik kelompok berpendapatan tinggi, berpendapatan sedang, maupun berpendapatan rendah, serta ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar daerah. Ketimpangan pendapatan yang terlalu tinggi dapat berdampak buruk terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga berpotensi memunculkan konflik. Setiap daerah memiliki tingkat ketimpangan yang berbeda-beda, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, agar

ketimpangan yang terjadi tidak semakin melebar, permasalahan tersebut perlu segera diatasi (Sugiarti & Erdkhadifa, 2023)

2.1.1.2 Teori Ketimpangan Pendapatan

Menurut Kuznets dalam Kuncoro (2006), pada tahap awal Pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung disertai dengan tingginya tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Kondisi tersebut terjadi karena manfaat pertumbuhan belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, seiring meningkatnya tingkat pembangunan dan kemajuan ekonomi, kemiskinan serta ketimpangan pendapatan akan berangsur-angsur menurun, membentuk pola hubungan berbentuk U terbalik. Selain itu, Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya.



Sumber: (Jannah, 2022)

Gambar 2.1 Kurva Kuznets

Berdasarkan Gambar 2.1 Kuznets menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan, kemudian

menurun pada tahap pembangunan selanjutnya. Pada fase awal pembangunan ekonomi, proses pembangunan menyebabkan distribusi pendapatan menjadi semakin tidak merata, namun seiring berjalannya waktu dan meningkatnya tingkat pembangunan, kondisi tersebut berangsur berubah menuju pemerataan pendapatan yang lebih baik. Seperti yang ditunjukkan pada kurva Kuznets, Gambar 2.1 memperlihatkan adanya korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang hubungan antara kedua variabel tersebut berubah menjadi korelasi negatif. Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi seringkali menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan teknologi. Namun, seiring dengan kemajuan pembangunan, kebijakan redistribusi pendapatan dan akses yang lebih merata terhadap pendidikan serta peluang ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung menurun (Jannah, 2022).

2.1.1.3 Indikator Ketimpangan Pendapatan

1. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Nilai Koefisien Gini berada pada rentang 0 hingga 1, yang menggambarkan perbandingan antara luas area yang terbentuk di antara Kurva Lorenz dan garis pemerataan sempurna terhadap luas keseluruhan area di bawah garis tersebut. Semakin kecil nilai Koefisien Gini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, sedangkan semakin besar nilainya mengindikasikan distribusi pendapatan yang semakin timpang antar kelompok masyarakat. Secara ekstrem, nilai Koefisien Gini sebesar 0

mencerminkan kondisi pemerataan pendapatan yang sempurna, di mana setiap individu memperoleh pendapatan yang sama, sedangkan nilai Koefisien Gini sebesar 1 menunjukkan ketidakmerataan yang sempurna, yaitu ketika seluruh pendapatan dikuasai oleh satu individu sementara individu lainnya tidak memperoleh pendapatan sama sekali (Oktarina & Yuliana, 2023).

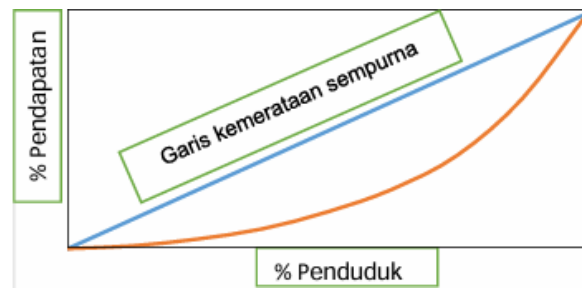
Tabel 2.1 Kategori Ketimpangan Pendapatan

Nilai	Keterangan
$< 0,4$	Tingkat ketimpangan rendah
$0,4-0,5$	Tingkat ketimpangan sedang
$> 0,5$	Tingkat ketimpangan tinggi

Sumber: (Oktarina & Yuliana, 2023).

2. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz merupakan kurva yang digunakan untuk menggambarkan distribusi pendapatan secara kumulatif dalam suatu perekonomian. Kurva ini digambarkan dalam sebuah bidang berbentuk bujur sangkar, di mana sumbu vertikal menunjukkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sumbu horizontal merepresentasikan persentase kumulatif jumlah penduduk. Semakin dekat posisi Kurva Lorenz terhadap garis diagonal atau garis pemerataan sempurna, maka semakin merata distribusi pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila Kurva Lorenz semakin menjauh dari garis diagonal dan membentuk lengkungan yang semakin besar, hal tersebut mencerminkan kondisi distribusi pendapatan nasional yang semakin timpang atau tidak merata (Jannah, 2022).



Sumber: (Jannah, 2022)

Gambar 2.2 Kurva Lorenz

Semakin jauh posisi Kurva Lorenz dari garis diagonal yang merepresentasikan pemerataan sempurna, maka semakin tinggi tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan yang ditunjukkan. Kondisi ketidakmerataan yang paling ekstrem, seperti ketika seluruh pendapatan hanya dikuasai oleh satu individu, akan digambarkan oleh Kurva Lorenz yang berhimpit dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal di sisi kanan (Jannah, 2022).

2.1.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Menurut Sjafrizal (dalam Oktarina & Yuliana, 2023) terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar wilayah, antara lain sebagai berikut:

1. Perbedaan potensi dan ketersediaan sumber daya alam antar wilayah.
2. Perbedaan kondisi demografis, khususnya jumlah dan kualitas penduduk.
3. Keterbatasan akses serta mobilitas barang dan jasa antar daerah.
4. Konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu.
5. Perbedaan alokasi investasi pemerintah dan kemampuan daerah menarik investasi swasta yang mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) didefinisikan sebagai suatu indeks komposit yang dirancang untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia secara lebih luas dibandingkan indikator ekonomi tunggal seperti pendapatan per kapita. IPM mempertimbangkan pilar-pilar dasar kualitas hidup manusia yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak sehingga dapat menggambarkan sejauh mana kemampuan manusia dalam mengakses kesehatan yang baik, pendidikan yang layak, dan daya beli yang memadai. Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan bagi individu, seperti kemampuan untuk hidup sehat, mendapatkan pendidikan, dan menikmati standar hidup layak, bukan semata-mata peningkatan pendapatan saja dan indikator IPM mengekspresikan pencapaian ketiga dimensi tersebut dalam satu nilai indeks (Budiarta & Anggraini, 2024)

IPM dijelaskan sebagai proses untuk memperbesar pilihan-pilihan dan juga untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga indikator komposit: angka harapan hidup saat lahir (dimensi kesehatan), rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (dimensi pendidikan), serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (dimensi standar hidup layak). Pendekatan komposit ini menjadikan IPM sebagai ukuran kesejahteraan sosial yang komprehensif karena mencerminkan pencapaian kualitas hidup manusia secara lebih holistik dibandingkan output ekonomi saja (UNDP, 2023).

Berdasarkan kajian tentang capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut UNDP, IPM dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya:

Tabel 2.2 Kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM < 60	IPM rendah
60 < IPM < 70	IPM sedang
70 < IPM < 80	IPM tinggi
IPM $\geq$ 80	IPM sangat tinggi

Sumber: (UNDP, 2023)

2.1.2.2 Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Teori *Human Capital* merupakan teori dalam ekonomi pembangunan dan ekonomi tenaga kerja yang menyatakan bahwa manusia dipandang sebagai bentuk modal (*capital*) yang dapat ditingkatkan nilainya melalui investasi pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kesehatan. Menurut Becker (1964), human capital adalah “*the stock of knowledge, skills, health, and values embodied in people that affect their productive capacity.*” Teori ini menegaskan bahwa pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan bukanlah konsumsi semata, melainkan investasi jangka panjang yang menghasilkan *return* berupa peningkatan produktivitas dan pendapatan individu maupun pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Teori *Human Capital* memandang manusia sebagai aset ekonomi yang sangat bernilai. Investasi dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan individu diyakini mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta menghasilkan kualitas layanan profesional yang lebih baik. Todaro dan Smith menjelaskan bahwa konsep *human capital* dapat dipahami sebagai bentuk investasi yang dilakukan individu dengan tujuan memperoleh peningkatan tingkat konsumsi dan kesejahteraan di masa mendatang. Secara teoretis, teori *human capital*

menegaskan bahwa keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upaya mewujudkan SDM yang berkualitas memerlukan proses pembangunan *human capital* melalui pengembangan kapasitas individu, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Dengan demikian, individu yang memiliki kualitas tersebut dapat berfungsi sebagai aset strategis dalam mendukung proses pembangunan ekonomi dan sosial (Adolph, 2016).

Pandangan ini sejalan dengan Schultz (1961) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi modern. Schultz menekankan bahwa kegagalan negara berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan sering kali disebabkan oleh rendahnya investasi pada manusia, bukan karena keterbatasan sumber daya alam atau modal fisik semata.

2.1.2.3 Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2017), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari beberapa dimensi utama, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

Setelah mendapatkan data di atas, dilanjutkan dengan rumus IPM secara keseluruhan yang mana dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{Ikesehatan \times Ipendidikan \times Ipengeluaran} \times 100$$

Nilai indeks yang diperoleh dari perhitungan setiap komponen berada dalam rentang 0 hingga 1, di mana nilai 0 mencerminkan kondisi terendah dan

nilai 1 menunjukkan kondisi tertinggi. Dalam laporan ini, nilai indeks tersebut dinyatakan dalam skala ratusan dengan mengalikan hasil perhitungan dengan 100, sebagaimana direkomendasikan oleh Badan Pusat Statistik, guna memudahkan proses interpretasi.

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.3.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran merupakan kondisi ketika individu yang termasuk dalam angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan meskipun memiliki keinginan dan upaya untuk bekerja. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak dikategorikan sebagai pengangguran. Dengan demikian, status pengangguran hanya melekat pada individu yang tidak bekerja namun secara aktif berusaha memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, pengangguran dapat didefinisikan sebagai kondisi sejumlah penduduk usia produktif, yaitu 15–64 tahun, yang termasuk dalam angkatan kerja dan belum memperoleh pekerjaan. Kelompok ini mencakup individu yang sedang aktif mencari pekerjaan maupun mereka yang untuk sementara waktu tidak bekerja. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan kualitas kehidupan manusia (Purba et al., 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran didefinisikan sebagai penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, atau tidak aktif mencari pekerjaan karena telah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Faktor utama penyebab pengangguran adalah rendahnya pengeluaran agregat. Ketika permintaan

terhadap barang dan jasa meningkat, produksi akan bertambah, yang pada akhirnya mendorong peningkatan penggunaan tenaga kerja (Sukirno, 2016).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. TPT mencerminkan persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dan berada dalam kondisi menganggur serta secara aktif mencari pekerjaan pada suatu wilayah dan periode tertentu (Batubara et al., 2023).

Besaran Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TPT = \frac{(\text{Jumlah Penganggur})}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Pengangguran terbuka mencakup penduduk yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan, serta mereka yang telah memperoleh pekerjaan namun belum mulai bekerja (Wati et al., 2024).

Dalam pengukuran tingkat pengangguran terbuka, terdapat beberapa klasifikasi usia penduduk yang dapat dikelompokkan sebagai pengangguran, yaitu sebagai berikut:

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan penduduk berusia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam kategori bekerja atau menganggur. Penduduk yang berusia di atas 15 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal digolongkan sebagai angkatan kerja. Sebaliknya, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang

masih menjalani pendidikan formal tidak termasuk dalam kategori angkatan kerja.

b. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk yang dalam satu minggu terakhir melakukan kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori angkatan kerja. Kelompok ini meliputi: (1) penduduk yang sedang menempuh pendidikan, baik pada jenjang SD, SMP, SMA, maupun pendidikan tinggi; (2) penduduk yang mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengelola atau membantu mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah; serta (3) kelompok lainnya, yaitu penduduk yang tidak lagi mampu melakukan aktivitas ekonomi, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, atau kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat bekerja.

2.1.3.2 Teori Pengangguran

1. Teori Klasik

Teori klasik memandang bahwa pengangguran muncul akibat adanya kesalahan alokasi sumber daya yang bersifat sementara dan dapat diselesaikan melalui mekanisme harga di pasar bebas, sehingga permintaan tenaga kerja mampu menyerap seluruh penawaran yang tersedia (Rahayu D et al., 2024). Dalam kerangka teori ini, kelebihan penawaran tenaga kerja akan mendorong penurunan tingkat upah, yang selanjutnya berdampak pada penyesuaian biaya produksi perusahaan. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan skala produksinya, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja akan meningkat. Apabila tingkat harga relatif stabil, peningkatan permintaan

tenaga kerja tersebut pada akhirnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar (Arifah & Prabowo, 2024).

2. Teori Keynes

John Maynard Keynes (1936) menjelaskan bahwa pengangguran terutama disebabkan oleh rendahnya permintaan agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan ini, kendala utama pertumbuhan ekonomi bukan terletak pada kemampuan produksi, melainkan pada lemahnya tingkat konsumsi masyarakat. Keynes menegaskan bahwa permasalahan tersebut tidak dapat diatasi hanya melalui mekanisme pasar bebas. Penurunan upah yang terjadi akibat meningkatnya jumlah tenaga kerja justru berdampak negatif, karena melemahkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Kondisi ini menyebabkan penurunan penjualan dan keuntungan perusahaan, sehingga mendorong pengurangan penggunaan tenaga kerja dan pada akhirnya meningkatkan pengangguran. Apabila pengangguran berlangsung secara berkelanjutan, kondisi ini berpotensi menimbulkan lingkaran kemiskinan.

Dalam keadaan permintaan agregat yang rendah, kapasitas produksi tidak dimanfaatkan secara optimal dan tingkat pengangguran cenderung meningkat. Oleh sebab itu, Keynes menekankan pentingnya upaya peningkatan permintaan agregat melalui kebijakan investasi, peningkatan belanja pemerintah, maupun dorongan terhadap konsumsi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja. Investasi dipandang sebagai komponen penting dalam permintaan agregat yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut diyakini dapat membuka lebih banyak

kesempatan kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran. Dalam konteks ini, Keynes juga menganjurkan adanya peran aktif pemerintah dalam menjaga tingkat permintaan agregat, termasuk melalui sektor pariwisata sebagai penyedia lapangan kerja, dengan tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli tetap terjaga (Wibowo, 2022).

2.1.3.3 Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Simanjuntak sebagaimana dikutip dalam Agusalm (2022), pengangguran dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jam Kerja

- 1) Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) adalah kondisi ketika tenaga kerja sama sekali tidak memiliki pekerjaan, meskipun telah berupaya secara aktif untuk memperoleh pekerjaan. Jenis pengangguran ini merupakan bentuk pengangguran yang paling nyata dalam masyarakat.
- 2) Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) merujuk pada individu yang bekerja dengan jam kerja sangat terbatas, yaitu kurang dari 7 jam per hari, sehingga kontribusi kerjanya belum optimal.
- 3) Setengah Menganggur (*Underemployment*) adalah kondisi pekerja yang bekerja kurang dari waktu kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam per minggu, akibat keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia.

2. Berdasarkan Penyebab Terjadinya

- 1) Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*) terjadi ketika tenaga kerja sedang berada dalam masa transisi, yaitu menunggu atau mencari pekerjaan yang dianggap lebih sesuai atau lebih baik.
- 2) Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*) disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan atau kualifikasi tenaga kerja dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau pasar kerja.
- 3) Pengangguran Teknologis (*Technological Unemployment*) muncul akibat perkembangan dan perubahan teknologi yang menggantikan peran tenaga kerja manusia dalam proses produksi.
- 4) Pengangguran Siklikal (*Cyclical Unemployment*) terjadi sebagai dampak dari penurunan aktivitas ekonomi atau resesi, yang menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja.
- 5) Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*) disebabkan oleh perubahan musim yang memengaruhi kegiatan ekonomi tertentu, terutama pada sektor pertanian dan perikanan.
- 6) Pengangguran Total adalah kondisi ketika individu sama sekali tidak memiliki pekerjaan karena tidak tersedianya lapangan kerja atau peluang kerja di wilayah tersebut.

2.1.4 Upah Minimum

2.1.4.1 Pengertian Upah Minimum

Pengertian upah sebagaimana dirumuskan pada Pasal 30 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Mustakim, 2025).

Upah adalah suatu penerimaan berupa imbalan dari pemberi kerja yang diberikan kepada penerima kerja atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Semakin tinggi tingkat upah, semakin kecil permintaan pengusaha akan tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran (Dini & Novera, 2024).

Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi besar kecilnya upah, seperti permintaan dan penawaran tenaga kerja, organisasi buruh, kemampuan bayar perusahaan, produktivitas, biaya hidup, peran pemerintah, keadilan, dan kelayakan upah. Kebijakan upah minimum di Indonesia terwujud dalam adanya Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan

mempertimbangkan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi, serta pertumbuhan ekonomi (Ali Mauludi AC et al., 2023).

2.1.4.2 Teori Upah Minimum

1. Teori Upah Efisiensi (*Efficiency Wage Theory*)

Teori upah efisiensi dikembangkan oleh Shapiro dan Stiglitz (1984) serta Akerlof dan Yellen (1986). Teori ini berpendapat bahwa pembayaran upah yang lebih tinggi dari tingkat pasar justru dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Upah yang lebih tinggi mendorong pekerja untuk bekerja lebih giat, mengurangi tingkat kemangkiran, menurunkan *turnover* tenaga kerja, serta meningkatkan loyalitas dan motivasi kerja (Agusalim & Novianti, 2024).

Dalam konteks ini, kebijakan upah minimum tidak selalu berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Jika kenaikan upah minimum mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara signifikan, maka biaya tambahan yang ditanggung perusahaan dapat diimbangi oleh peningkatan output. Oleh karena itu, teori upah efisiensi menjelaskan mengapa dalam beberapa kasus empiris, kenaikan upah minimum tidak selalu meningkatkan pengangguran, bahkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan kesejahteraan pekerja (Agusalim & Novianti, 2024).

2. Teori Pasar Tenaga Kerja & Neoklasik

Dalam teori ini, upah ditentukan oleh produktivitas marginal tenaga kerja. Perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja hingga nilai produk marginal tenaga kerja sama dengan tingkat upah yang dibayarkan.

Menurut ekonom neoklasik seperti George Stigler (1946), upah minimum dipandang sebagai *price floor* di pasar tenaga kerja. Apabila upah minimum ditetapkan di atas tingkat upah keseimbangan, maka permintaan tenaga kerja akan menurun, terutama untuk tenaga kerja berpendidikan dan berkeahlian rendah. Kondisi ini dapat meningkatkan pengangguran, khususnya di sektor formal. Sebaliknya, jika upah minimum ditetapkan di bawah atau sama dengan upah keseimbangan, maka kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan distorsi yang signifikan di pasar tenaga kerja. Dengan demikian, teori neoklasik menekankan bahwa dampak upah minimum sangat bergantung pada tingkat penetapannya relatif terhadap keseimbangan pasar (Sholeh, 2012).

2.1.4.3 Jenis-Jenis Upah

Menurut Zaeni Asyhadie (2019), upah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri dalam hubungan ketenagakerjaan, antara lain sebagai berikut:

1. Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja atau buruh sebagai imbalan atas jasa dan tenaga yang telah diberikan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

2. Upah Nyata (*Real Wages*)

Upah nyata merupakan upah yang secara riil benar-benar diterima dan dirasakan manfaatnya oleh pekerja atau buruh. Besarnya upah nyata ditentukan oleh tingkat daya beli upah tersebut, yang dipengaruhi oleh:

- a. besar kecilnya jumlah uang yang diterima, dan

- b. tinggi rendahnya biaya hidup yang harus dipenuhi.

3. Upah Minimum

Upah minimum adalah tingkat upah terendah yang ditetapkan sebagai acuan bagi perusahaan dalam menentukan besaran upah pekerja atau buruh. Penetapan upah minimum ini pada umumnya dilakukan oleh pemerintah dan diperbarui secara berkala setiap tahun.

4. Upah Hidup

Upah hidup adalah tingkat upah yang diterima pekerja yang secara relatif mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh. Upah ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup kebutuhan sosial pekerja dan keluarganya, seperti pendidikan, jaminan atau asuransi, rekreasi, serta kebutuhan lainnya.

5. Upah Wajar

Upah wajar adalah tingkat upah yang secara relatif dipandang layak baik oleh pengusaha maupun pekerja/buruh sebagai balas jasa atas kontribusi dan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

2.1.5 Teknologi Informasi dan Komunikasi

2.1.5.1 Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terus berkembang pesat di seluruh dunia dan telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Saat ini, TIK tidak hanya berperan sebagai pendukung (*support*), tetapi juga sebagai penggerak utama (*enabler*) dalam proses pembangunan (Adristi, 2024). Perkembangan teknologi saat ini berlangsung dengan sangat pesat dan

memberikan dampak besar terhadap kemajuan proses pembangunan. Tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh manusia kini mulai dialihkan kepada mesin-mesin canggih yang mampu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kuantitas. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi pun mengalami percepatan (Baihaqi, 2024).

Di era digital saat ini, perkembangan TIK telah menjadi pilar utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Dengan kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya merubah cara berkomunikasi tetapi juga mengubah cara bekerja, belajar, dan berinteraksi. Infrastruktur digital yang semakin canggih memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pembangunan TIK juga mendorong integrasi sistem yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung berbagai industri, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, serta sektor publik dan swasta (BPS, 2023).

Menurut UNESCO (2004) dalam (Harahap, 2019), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *Information and Communication Technologies* (ICT) merupakan suatu program yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses, sebagai alat bantu untuk memanipulasi dan menyampaikan informasi, ataupun teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi.

2.1.5.2 Teori Solow-Swan

Solow-Swan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan perkembangan teknologi. Model Solow-Swan menggunakan fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dalam teori Solow-Swan, kemajuan teknologi dapat dinilai dari peningkatan keterampilan dan inovasi yang mengarah pada produktivitas yang lebih besar. Model neo-klasik mengasumsikan bahwa semua faktor produksi (modal atau tenaga kerja) digunakan secara optimal dalam proses produksi (*full employment*) (Riani & Suseno, 2025).

Perkembangan teknologi dianggap mampu menaikkan tenaga kerja secara tepat guna dalam kegiatan produksi. Namun, perkembangan teknologi tidak secara langsung menaikkan tenaga kerja yang digunakan, melainkan menumbuhkan nilai output yang didapatkan. Sehingga dalam pemikiran neo-klasik yang diungkapkan oleh Solow-Swan (1956) menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi tidak bergantung pada faktor-faktor ekonomi lainnya dan dianggap sebagai faktor eksternal yang berpengaruh atas pertumbuhan ekonomi tetapi tanpa dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi lainnya (Riani & Suseno, 2025).

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel berikut ini merupakan penjelasan mengenai penelitian penelitian terdahulu yang menjadi sumber berpikir penulis, serta untuk memperluas informasi tentang ruang lingkup penelitian. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan bahan pertimbangan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun) dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ersad, M. E., Amir, A. ., & Zulgani, Z. (2022). Dampak IPM, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Bagian Selatan.	IPM, Tingkat Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan	Tingkat Kemiskinan. Regresi data panel model FEM.	IPM dan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.	Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.17.No.2, April-Juni 2022 ISSN: 2684 - 7868
2.	Firdaus, A., & Indira Hasmarini, M. . (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022.	IPM, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum, Ketimpangan Pendapatan	Jumlah Penduduk. Regresi data panel model REM.	IPM, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Upah Minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	Primanomics : Jurnal Ekonomi dan Bisnis- Vol. 21. No.3(2023) ISSN: 2614- 6789
3.	Julihanza, A., & Khoirudin, R. (2023). Determinan Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Sumatera.	Upah Minimum, Ketimpangan Pendapatan	Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Jumlah Penduduk. Regresi data panel model REM.	Pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap	<i>Journal of Macroecono mics and Social Development</i> , Vol.: 1, Nomor 2, 2023, Hal: 1-12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				ketimpangan pendapatan.	https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i2.93
4.	Putri, D. Y., & Aminda, R. S. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Upah Minimum, Ketimpangan Pendapatan	Pengeluaran Per Kapita, Inflasi, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Regresi data panel model CEM.	Pengeluaran per kapita dan inflasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Upah minimum dan RLS berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.	<i>Jurnal Of Development Economic And Digitalization</i> , Vol. 3, No. 1, 2024 ISSN: 2962-8520
5.	Lestari, F., Olilingo, F. Z., & Mopangga, H. (2024). Analisis Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Gorontalo Tahun 2018–2022.	IPM, Ketimpangan Pendapatan.	Jumlah Penduduk, PDRB Perkapita. Regresi data panel model REM.	Jumlah penduduk dan PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.	Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 13. No. 2. Tahun 2024 Hal 306-322 ISSN: 2684 9313
6.	Wijayanti, D., & Putri, I. D. N. . (2023). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2017-2022.	IPM, Upah Minimum, Teknologi, Ketimpangan Pendapatan.	PDRB. Regresi data panel model FEM.	UMR berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, TIK berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, PDRB dan IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.	Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan, 2 (2), 126–134. https://doi.org/10.20885/
7.	Dewi, Dyah Makutaning, Setiadi, Yaya, Ikhwanuddin, Mohammad & Fadhilah, Laila Amalia (2022). Kontribusi Teknologi	TIK, Ketimpangan Pendapatan.	PDRB Perkapita, Rata-Rata Lama Sekolah. Analisis inferensia.	Pada daerah ketimpangan tinggi persentase rumah tangga yang memiliki atau menguasai komputer berpengaruh positif dan	Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia: Vol. 22: No. 2, Article 5. e-ISSN 2406-9280.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Informasi dan Komunikasi terhadap Kelompok Ketimpangan Pendapatan Daerah.			signifikan, persentase rumah tangga yang mengakses internet berpengaruh negatif dan signifikan. Daerah ketimpangan rendah hanya persentase rumah tangga yang mengakses internet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio gini.	DOI: 10.21002/jepi.2022.13
8.	M. Janah (2022). Analisis Pengaruh Tingkat PDRB PerKapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia periode tahun 2019-2021.	IPM, Ketimpangan Pendapatan.	PDRB Perkapita, Penanaman Modal Asing (PMA). Regresi data panel model REM.	PDRB perkapita dan PMA berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.	Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol.1, No.4 November 2022 e-ISSN: 2963-5292; Hal 23-44
9.	Pardede, M., & Yuniasih, A. F. (2025). Pengaruh Globalisasi, Perkembangan Finansial, dan TIK terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Barat dan Timur Indonesia.	Teknologi, Ketimpangan Pendapatan.	Keterbukaan Perdagangan, Keterbukaan Finansial. Regresi data panel model FEM.	Keterbukaan perdagangan dan keterbukaan finansial meningkatkan ketimpangan di KBI dan KTI. Perkembangan finansial dan TIK mampu menurunkan ketimpangan pendapatan di KBI.	Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. 32 No. 1 Tahun 2024 eISSN: 2503 0272

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Wijayanti, N. N. A. ., Ratih, A. ., Usman, M. ., Aida, N. ., & Ciptawaty, U. . (2023). Analisis Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 2018-2021.	Teknologi, Ketimpangan Pendapatan.	Pembentukan Modal Tetap Bruto, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TKA). Regresi data panel model FEM.	Pembentukan modal tetap bruto dan teknologi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. TKA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	<i>Economics and Digital Business Review</i> , 4(2), 245–265. https://doi.org/10.37531/economica.v4i2.628
11.	Kaimuddin, A. (2024). Determinan Ketimpangan Antar Wilayah Jawa Timur.	Tingkat Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan.	Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Analisis LQ	Aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan. TPT berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan.	Jurnal Cita Ekonomika, 18(2), pp. 99-106. doi: 10.51125/citaekonomika.v18i2.12170.
12.	Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.	IPM, Tingkat Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan.	PDRB, Kemiskinan. Analisis Regresi Linear Berganda.	PDRB, IPM dan kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. TPT berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.	Ekonomika wan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 24, No.2 Desember 2024 E-ISSN : 2598-0157.
13.	Crismestika, A., & Parianom, R. (2025). Apa	IPM, Ketimpangan Pendapatan.	Inklusi Keuangan, PDRB Perkapita.	PDRB Perkapita secara negatif signifikan, IPM secara positif	<i>Veteran Economics, Management</i> , &

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	penyebab ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa?		Regresi data panel model FEM.	signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan, sedangkan inklusi keuangan secara positif tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan.	<i>Accounting Review</i> , Vol. 4, No. 1, 2025 ISSN (online): 2962-8830
14.	Meidiyan, H., Asrini, A., & Irmanelly, I. (2025). Pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi.	IPM, Upah Minimum, Ketimpangan Pendapatan.	Pertumbuhan Ekonomi. Analisis Regresi Linear Berganda.	IPM dan Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Vol.1, No. 3, 2025 623–636. eISSN 3089 8374 https://doi.org/10.63822/Opa9km04
15.	Sutrisno, S., Shirly Risfia Anggraini, S., & Siti Alfiyana, S. (2024). Pengaruh IPM dan Investasi Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021.	IPM, Ketimpangan Pendapatan.	Investasi PMDN. Analisis Regresi Linear Berganda.	IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Investasi PMDN berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Vol. 3, No. 5, 2058–2068. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i5.4498
16.	Marhamah, S., Priyono, T. H., & Qori'ah, C. G. (2025). <i>Income Inequality in Java: The Impact of the</i>	IPM, Upah Minimum, Ketimpangan Pendapatan.	Laju Pertumbuhan Penduduk. Regresi data panel model FEM.	IPM, upah minimum dan laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap	<i>International Research Journal of Economics and Management Studies</i> , 4(6), 81–86. https://doi.org

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Development Index, Provincial Minimum Wage and Population Growth Rate.</i>			ketimpangan pendapatan.	org/10.5647/2/25835238/IRJEMS-V4I6P110
17.	Rozi, M. F., & Atmanti, H. D. (2024). <i>Analysis of Economic Growth, Minimum Wage, Unemployment, and HDI on Income Distribution Inequality in Sulawesi.</i>	IPM, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum, Ketimpangan Pendapatan.	Pertumbuhan Ekonomi. Regresi data panel model REM.	Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Tingkat pengangguran dan IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.	<i>International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics</i> , 3(5), 432. https://doi.org/10.54443/sj.v3i5.432
18.	Law, S. H., Tan, H. B., & Azman-Saini, W. N. W. (2014). <i>Financial Development and Income Inequality at the Global Level.</i>	IPM, Tingkat Pengangguran, Teknologi, Ketimpangan Pendapatan.	Sektor Keuangan. Metode <i>Threshold regression approach</i> .	Sektor keuangan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan pada tahap awal, namun berpengaruh negatif pada tahap selanjutnya. IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif. Pengaruh teknologi bersifat positif atau negatif, tergantung pada kualitas sumber daya manusia dan tingkat inklusivitasnya.	<i>World Development</i> , 65, 1–18. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.06.002

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Mengacu pada teori yang ada maka garis besar penelitiannya ini yaitu melihat hubungan antara IPM, tingkat pengangguran, upah minimum, dan TIK dengan ketimpangan pendapatan.

2.2.1 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Ketimpangan Pendapatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM diharapkan mampu meningkatkan kemampuan individu dalam mengakses peluang ekonomi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta memperluas kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan kualitas manusia melalui IPM berpotensi mendorong pemerataan pendapatan dan menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok Masyarakat (Fanshuri et al., 2022).

Teori Human Capital yang dikemukakan oleh Becker (1964) menegaskan bahwa investasi pada pendidikan, kesehatan, dan keterampilan merupakan investasi jangka panjang yang menghasilkan peningkatan produktivitas dan pendapatan individu. Pandangan ini diperkuat oleh Schultz (1961) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi modern. Negara atau daerah dengan tingkat investasi human capital yang

tinggi cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih produktif, sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata dan ketimpangan pendapatan dapat ditekan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lala, Naukoko, & Siwu (2023) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat mampu memperkecil kesenjangan pendapatan karena masyarakat memiliki kesempatan yang lebih setara dalam memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Dengan demikian, peningkatan IPM menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan.

2.2.2 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Ketimpangan Pendapatan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan proporsi angkatan kerja yang belum terserap dalam kegiatan ekonomi produktif. Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pencari kerja. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan, sehingga sebagian penduduk tidak memiliki sumber penghasilan atau hanya memperoleh pendapatan yang sangat rendah. Ketimpangan pendapatan cenderung meningkat karena pendapatan hanya terdistribusi pada kelompok masyarakat yang telah bekerja, sementara kelompok penganggur tertinggal secara ekonomi (Marsuri, 2024).

Hambatan pertumbuhan ekonomi yang memengaruhi ketimpangan pendapatan pula disebabkan karena persoalan tingkat pengangguran terbuka yang

masih belum teratasi dengan baik, yang mana apabila permasalahan tingkat pengangguran ini terus berjalan atau meningkat dapat memengaruhi tingkat penghasilan masyarakat. Hal tersebut akan berdampak pada kesanggupan masyarakat dalam melengkapi kebutuhan hidupnya menjadi minim terpenuhi, bahkan cenderung tidak bisa memenuhi kebutuhannya dikarenakan masih adanya masyarakat yang menganggur (Sholikhah, 2022).

Secara teoretis, teori klasik memandang pengangguran sebagai kondisi sementara yang muncul akibat ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dalam mekanisme pasar bebas, kelebihan penawaran tenaga kerja akan menekan tingkat upah sehingga mendorong perusahaan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan menyerap pengangguran. Namun, apabila penyesuaian pasar tenaga kerja tidak berjalan secara optimal, pengangguran dapat berlangsung lebih lama dan menyebabkan sebagian masyarakat tidak memperoleh pendapatan. Kondisi ini berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan karena hanya kelompok yang terserap dalam pasar kerja yang menikmati pendapatan.

Hubungan antara tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti & Erdkhadifa (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meningkatnya tingkat pengangguran akan memperbesar ketimpangan pendapatan akibat terbatasnya kesempatan kerja dan menurunnya pendapatan sebagian masyarakat.

2.2.3 Hubungan Upah Minimum dengan Ketimpangan Pendapatan

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui keputusan gubernur sebagai jaring pengaman bagi pekerja, khususnya pekerja lajang dengan masa kerja 0–1 tahun. Upah minimum berfungsi untuk melindungi pekerja berpendapatan rendah dan menjamin pemenuhan standar hidup minimum yang mencakup kebutuhan dasar seperti kesehatan, kesejahteraan, dan efisiensi kerja. Penetapannya didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi, dan berlaku sebagai standar minimum yang wajib dipatuhi oleh pengusaha dalam memberikan upah kepada tenaga kerja (Dongoran et al., 2023).

Teori upah efisiensi menyatakan bahwa pembayaran upah di atas tingkat pasar dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan motivasi, penurunan kemangkiran, dan berkurangnya turnover, sehingga kebijakan upah minimum tidak selalu berdampak buruk terhadap penyerapan tenaga kerja apabila peningkatan upah mampu diimbangi oleh kenaikan produktivitas dan output (Agusalim & Novianti, 2024).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anshari, Azhar & Ariusni (2019), menemukan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Ketika upah minimum naik, selisih pendapatan antara kelompok berpendapatan rendah dan menengah/tinggi menjadi lebih kecil, sehingga distribusi pendapatan relatif lebih merata. Selain itu, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan daya beli pekerja berupah rendah dan mengurangi

dorongan migrasi ekonomi, yang pada akhirnya membantu menekan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

2.2.4 Hubungan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Ketimpangan Pendapatan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan besar dalam aktivitas ekonomi dan struktur pasar tenaga kerja. Difusi TIK memberikan berbagai manfaat bagi individu dan kelompok yang mampu mengakses serta memanfaatkannya, seperti kemudahan memperoleh informasi, peningkatan konektivitas, dan efisiensi proses bisnis (Kartiasih et al., 2023).

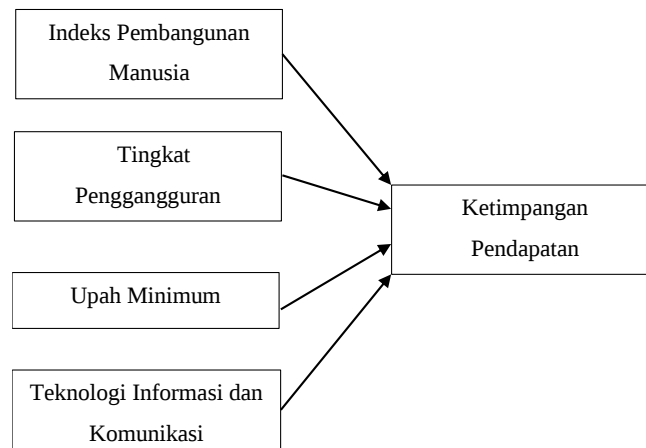
Secara teoretis, teori kemajuan teknologi yang dikemukakan oleh Solow menjelaskan bahwa teknologi merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan produktivitas total faktor. Kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi penggunaan modal dan tenaga kerja sehingga output dapat meningkat (Riani & Suseno, 2025).

Selain itu, perkembangan TIK turut mengubah struktur pekerjaan menjadi lebih fleksibel dan mendorong meningkatnya pola kerja informal. Akses internet yang semakin cepat dan mudah memungkinkan pekerjaan dilakukan secara jarak jauh serta membuka peluang kerja berbasis platform digital (Wahyuni & Hidayati, 2025).

Hal ini sejalan dengan penelitian Wibowo dan Aisyah (2025) yang menunjukkan bahwa TIK berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Peningkatan akses dan pemanfaatan TIK mampu memperluas kesempatan ekonomi, mempercepat penyebaran informasi, serta membuka peluang usaha dan

lapangan kerja baru, sehingga berkontribusi dalam menurunkan kesenjangan pendapatan antarwilayah.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Pernyataan sementara yang disusun sebagai jawaban awal atas permasalahan penelitian, yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui pengujian empiris. Dengan demikian, hipotesis dapat berupa dugaan yang memiliki kemungkinan benar atau salah. Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga dalam jangka pendek indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh negatif secara parsial terhadap ketimpangan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan empat provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2024.

2. Diduga dalam jangka panjang indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh negatif secara parsial terhadap ketimpangan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan empat provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2024.
3. Diduga secara bersama-sama indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan empat provinsi Pulau Jawa tahun 2010-2024.